



**KEPALA DESA GEMPOL KLUUTUK
KECAMATAN TARIK KABUPATEN SIDOARJO**

PERATURAN DESA GEMPOL KLUTUK

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDES)

TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEMPOL KLUTUK

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar - besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II

Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024

- tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);
- 14. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 - 15. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 262);
 - 16. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593);
 - 17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 530);
 - 18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 - 19. Surat Edaran Bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Menteri Keuangan RI, dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 9 Tahun 2025, Nomor SE-2/MK.08/2025, Nomor 100.3.2.3/9692/SJ/2025 tentang penjelasan tidak lanjut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana

- Desa Tahun Anggaran 2025;
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Nomor 2849/2015);
 - 21 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
 - 22 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
 - 23 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 10);
 - 24 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 48);
 - 25 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77), sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
- 26 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 49);
 - 27 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 23);
 - 28 Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
 - 29 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
 - 30 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor

- 50);
- 31 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 60);
 - 32 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 58).
 - 33 Peraturan Desa Gempol Klutuk Nomor 06 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 – 2027;
 - 34 Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gempol Klutuk Tahun 2026 (Berita Desa Gempol Klutuk Tahun 2025 Nomor 07);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih;

2. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;

3. Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, nomor : 400.10.2.4/4334/438.5.8/2025, tanggal 27 April 2025, perihal : Petunjuk Penyusunan Perubahan Perdes APBDes Tahun 2025;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMPOL KLUTUK
Dan
KEPALA DESA GEMPOL KLUTUK
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMPOL KLUTUK TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempol Klutuk Tahun Anggaran 2026 mengalami perubahan Kedua dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Desa			
	- PAD	Rp	65.070.000,00	
	- Dana Desa	Rp	452.018.976,00	
	- Alokasi Dana Desa	Rp	431.102.693,00	
	- Bagian dari Hasil Pajak	Rp	437.040.982,00	
	- Retribusi Daerah Kabupaten	Rp	28.354.664,00	
	Jumlah Pendapatan	Rp	1.413.587.315,00	
2	Belanja Desa			
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	486.351.959,51	
b.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	280.413.196,00	
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	51.203.664,00	
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	483.073.611,52	
e.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	Rp	33.600.000,00	
	Jumlah Belanja	Rp	1.334.642.431,03	
	Surplus/(Defisit)	Rp	78.944.883,97	
3	Pembiayaan Desa			
a.	Penerimaan	Rp	11.458.911,23	
b.	Pengeluaran	Rp	90.403.795,20	
	Selisih pembiayaan (a-b)	Rp	'- 78.944.883,97	
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa;

- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak;
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga;
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya;
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - (a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - (b) tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - (c) berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - (d) memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - (e) berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan;
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta diberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gempol Klutuk.

Ditetapkan di : Gempol Klutuk

Pada tanggal : 29 Desember 2025



Diundangkan di : Gempol Klutuk

Pada tanggal : 29 Desember 2025

Sekretaris Desa Gempol Klutuk



LEMBARAN DESA GEMPOL KLUTUK NOMOR 10 TAHUN 2025



KEPALA DESA GEMPOL KLUUTUK
KECAMATAN TARIK KABUPATEN SIDOARJO
PERATURAN KEPALA DESA GEMPOL KLUTUK
NOMOR 04 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDES)
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GEMPOL KLUTUK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

3. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);
14. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
15. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 262);
16. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 530);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
19. Surat Edaran Bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Menteri Keuangan RI, dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 9 Tahun 2025, Nomor SE-2/MK.08/2025, Nomor 100.3.2.3/9692/SJ/2025 tentang penjelasan tidak lanjut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Nomor 2849/2015);
- 21 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
- 22 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
- 23 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 10);
- 24 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 48);
- 25 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
- 26 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 49);
- 27 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan

- Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 23);
- 28 Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
 - 29 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
 - 30 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Taun 2023 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 50);
 - 31 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 60);
 - 32 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 58).
 - 33 Peraturan Desa Gempol Klutuk Nomor 06 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 – 2027;
 - 34 Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gempol Klutuk Tahun 2026 (Berita Desa Gempol Klutuk Tahun 2025 Nomor 07);
 - 35 Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempol Klutuk Tahun 2026.

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih;
2. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
3. Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, nomor : 400.10.2.4/4334/438.5.8/2025, tanggal 27 April 2025, perihal : Petunjuk Penyusunan Perubahan Perdes APBDes Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMPOL KLUTUK TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempol Klutuk Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Desa - PAD - Dana Desa - Alokasi Dana Desa - Bagian dari Hasil Pajak - Retribusi Daerah Kabupaten	Rp	65.070.000,00 452.018.976,00 431.102.693,00 437.040.982,00 28.354.664,00
	Jumlah Pendapatan	Rp	1.413.587.315,00
2	Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	Rp	486.351.959,51 280.413.196,00 51.203.664,00 483.073.611,52 33.600.000,00
	Jumlah Belanja	Rp	1.334.642.431,03
	Surplus/(Defisit)	Rp	78.944.883,97
3	Pembiayaan Desa a. Penerimaan b. Pengeluaran	Rp	11.458.911,23 90.403.795,20
	Selisih pembiayaan (a-b)	Rp	- 78.944.883,97
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gempol Klutuk.

Ditetapkan di : Gempol Klutuk
Pada tanggal : 29 Desember 2025



Diundangkan di : Gempol Klutuk
Pada tanggal : 29 Desember 2025
Sekretaris Desa Gempol Klutuk



WIWIK RYANTI
LEMBARAN DESA GEMPOL KLUTUK NOMOR 11 TAHUN 2025

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA GEMPOLKLUTUK
 NOMOR 10 TAHUN 2025
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GEMPOLKLUTUK
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	65.070.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.348.517.315,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.413.587.315,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	568.500.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	727.542.431,03	
5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	33.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.334.642.431,03	
	SURPLUS / (DEFISIT)	78.944.883,97	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	11.458.911,23	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	11.458.911,23	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	90.403.795,20	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	90.403.795,20	
	PEMBIAYAAN NETTC	(78.944.883,97)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



GEMPOLKLUTUK, 31 Desember 2025

LAMPIRAN
PERATURAN DESA GEMPOLKUTUK
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GEMPOLKUTUK
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	65.070.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.348.517.315,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.413.587.315,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	529.291.957,51	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	427.520.107,51	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	102.940.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	102.940.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	249.600.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	249.600.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	53.919.538,23	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.919.538,23	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.500.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	13.560.569,28	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.560.569,28	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	27.104.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	27.104.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.104.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.000.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ d ll)	6.000.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	67.667.850,00	
1.5.91		Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	67.667.850,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.667.850,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	280.413.198,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	13.900.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	8.900.000,00	DDS, PBH
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.900.000,00	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	5.000.000,00	DDS
2.1.04	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	151.346.198,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Burnil, Lansia, Insentif)	37.996.198,00	DDS, PAD, PBH
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.996.198,00	
2.2.03		Penyaluan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	30.300.000,00	DDS, PBH
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.300.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	67.000.000,00	DDS, PBH
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.000.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Senam Desa	13.050.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.050.000,00	
2.2.91		Dukungan Pencegahan/Penanganan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif lainnya) dan Penyakit Men	3.000.000,00	DDS, PBH
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	24.000.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	21.600.000,00	DDS, PBH
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	2.400.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	14.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	14.000.000,00	DDS, PBH
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	77.167.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	76.967.000,00	DDS, PAD, PBH
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.967.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	200.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	51.203.664,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	37.500.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah	36.500.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.500.000,00	
3.1.06		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	1.000.000,00	PBH
3.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	7.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	7.500.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.000.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/ Kab/Kota	4.000.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.203.664,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	2.203.664,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.203.664,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	440.133.611,52	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	73.752.760,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	73.752.760,00	DDS, PBH
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.752.760,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	251.160.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	7.200.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	183.960.000,00	ADD, PAD, PBH
4.3.02	5.1.	Belanja Pegawai	164.960.000,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	60.000.000,00	ADD, PBH
4.3.03	5.1.	Belanja Pegawai	51.000.000,00	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	86.220.851,52	
4.4.01		Pelatihan dan Penyaluhan Pemberdayaan Perempuan	86.220.851,52	DDS, PBH
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.220.851,52	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	29.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	29.000.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	33.600.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.500.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.500.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	32.100.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	32.100.000,00	DDS, PBH
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	32.100.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.334.642.431,03	
		SURPLUS / (DEFISIT)	78.944.883,97	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
	6.1. Penerimaan Pembiayaan		11.458.911,23	
	6.2. Pengeluaran Pembiayaan		90.403.795,20	
	PEMBIAYAAN NETTC		(78.944.883,97)	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	



PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GEMPOLKLUTUK
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			65.070.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa			65.070.000,00	
	4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			65.070.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			1.348.517.315,00	
	4.2.1.	Dana Desa			452.018.976,00	
	4.2.1.01.	Dana Desa			452.018.976,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			465.395.646,00	
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			465.395.646,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			431.102.693,00	
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			431.102.693,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank			0,00	
	4.3.6.01.	Bunga Bank			0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN				1.413.587.315,00	
01	5.	BELANJA				
01.01.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				529.291.957,51	
1.01.01.	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa				427.520.107,51	
1.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa				102.940.000,00	ADD, PAD, PBH
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			102.940.000,00	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			102.940.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa			60.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa			12.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.90.	Tunjangan Keluarga			6.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.91.	Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa			17.400.000,00	
1.01.01.	5.1.1.92	Tunjangan Penambah Kebutuhan Kepala Desa			2.500.000,00	
1.01.01.	5.1.1.94.	Uang Makan			5.040.000,00	
1.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa				249.600.000,00	ADD, PAD, PBH
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			249.600.000,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			249.600.000,00	
1.01.02.	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			249.600.000,00	
1.01.02.	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa			0,00	
1.01.02.	5.1.2.90.	Tunjangan Keluarga			0,00	
1.01.02.	5.1.2.91.	Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa			0,00	
1.01.02.	5.1.2.92	Tunjangan Penambah Kebutuhan Perangkat Desa			0,00	
1.01.02.	5.1.2.94.	Uang Makan			0,00	
1.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)				53.919.538,23	ADD, DLL, PAD, PBH
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			53.919.538,23	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			20.319.538,23	
1.01.04.	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			6.934.925,23	
1.01.04.	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			5.000.000,00	
1.01.04.	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			4.218.241,00	
1.01.04.	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			4.166.372,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			33.600.000,00	
1.01.04.	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			33.600.000,00	
1.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)				7.500.000,00	PBH
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa			60.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa			12.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.90.	Tunjangan Keluarga			6.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.91.	Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa			17.400.000,00	
1.01.01.	5.1.1.92.	Tunjangan Penambah Kebutuhan Kepala Desa			2.500.000,00	
1.01.01.	5.1.1.94.	Uang Makan			5.040.000,00	
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			249.600.000,00	ADD, PAD, PBH
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			249.600.000,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			249.600.000,00	
1.01.02.	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			249.600.000,00	
1.01.02.	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa			0,00	
1.01.02.	5.1.2.90.	Tunjangan Keluarga			0,00	
1.01.02.	5.1.2.91.	Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa			0,00	
1.01.02.	5.1.2.92.	Tunjangan Penambah Kebutuhan Perangkat Desa			0,00	
1.01.02.	5.1.2.94.	Uang Makan			0,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)			53.919.538,23	ADD, DLL, PAD, PBH
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			53.919.538,23	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			20.319.538,23	
1.01.04.	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			6.934.925,23	
1.01.04.	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			5.000.000,00	
1.01.04.	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			4.218.241,00	
1.01.04.	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			4.166.372,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			33.600.000,00	
1.01.04.	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			33.600.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)			7.500.000,00	PBH
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.500.000,00	
1.01.06.	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.500.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.000.000,00	
1.01.08.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa			13.560.569,28	DDS
1.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			13.560.569,28	
1.01.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.500.000,00	
1.01.08.	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.500.000,00	
1.01.08.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			500.000,00	
1.01.08.	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			500.000,00	
1.01.08.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			3.000.000,00	
1.01.08.	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			3.000.000,00	
1.01.08.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			7.560.569,28	
1.01.08.	5.2.7.91.	Belanja Hadiah Kegiatan			7.560.569,28	
01.02.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			27.104.000,00	
1.02.02.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa			27.104.000,00	PBH
1.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			27.104.000,00	
1.02.02.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			17.104.000,00	
1.02.02.	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik			12.000.000,00	
1.02.02.	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			5.104.000,00	
1.02.02.	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			0,00	
1.02.02.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			10.000.000,00	
1.02.02.	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan			10.000.000,00	
01.04.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			7.000.000,00	
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)			1.000.000,00	PBH
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.000.000,00	
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.03.	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.000.000,00	
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)			6.000.000,00	PBH
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.000.000,00	
1.04.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.000.000,00	
1.04.04.	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			6.000.000,00	
01.05.		Sub Bidang Pertanahan			67.667.850,00	
1.05.91.		Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			67.667.850,00	PBH
1.05.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			67.667.850,00	
1.05.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.247.850,00	
1.05.91.	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			147.850,00	
1.05.91.	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.500.000,00	
1.05.91.	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			600.000,00	
1.05.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.400.000,00	
1.05.91.	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			8.400.000,00	
1.05.91.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			8.000.000,00	
1.05.91.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			8.000.000,00	
1.05.91.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			47.020.000,00	
1.05.91.	5.2.7.91	Belanja Hadiah Kegiatan			47.020.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			280.413.198,00	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			13.900.000,00	
2.01.01.		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)			8.900.000,00	DDS, PBH
2.01.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.900.000,00	
2.01.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.400.000,00	
2.01.01.	5.2.2.90.	Belanja Jasa Pelaksana Pendidikan Desa			7.400.000,00	
2.01.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.500.000,00	
2.01.01.	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			1.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.01.04.		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa			5.000.000,00	DDS
2.01.04.	5.3.	Belanja Modal			5.000.000,00	
2.01.04.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			5.000.000,00	
2.01.04.	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			5.000.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			151.346.198,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)			37.996.198,00	DDS, PAD, PBH
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			37.996.198,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			33.196.198,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			26.196.198,00	
2.02.02.	5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan			7.000.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.000.000,00	
2.02.02.	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			3.000.000,00	
2.02.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.800.000,00	
2.02.02.	5.2.3.90.	Belanja Bantuan Transport			1.800.000,00	
2.02.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)			30.300.000,00	DDS, PBH
2.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			30.300.000,00	
2.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.000.000,00	
2.02.03.	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.000.000,00	
2.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			23.300.000,00	
2.02.03.	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			2.400.000,00	
2.02.03.	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			20.900.000,00	
2.02.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.000.000,00	
2.02.03.	5.2.3.90.	Belanja Bantuan Transport			2.000.000,00	
2.02.04.		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan			67.000.000,00	DDS, PBH
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			67.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			18.500.000,00	
2.02.04.	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			18.500.000,00	
2.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			29.800.000,00	
2.02.04.	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			27.000.000,00	
2.02.04.	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.800.000,00	
2.02.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			1.800.000,00	
2.02.04.	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			1.800.000,00	
2.02.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			10.900.000,00	
2.02.04.	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			10.900.000,00	
2.02.04.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			6.000.000,00	
2.02.04.	5.2.7.91.	Belanja Hadiah Kegiatan			6.000.000,00	
2.02.90.		Penyelenggaraan Senam Desa			13.050.000,00	DDS
2.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			13.050.000,00	
2.02.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			10.000.000,00	
2.02.90.	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			10.000.000,00	
2.02.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			800.000,00	
2.02.90.	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00	
2.02.90.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			2.250.000,00	
2.02.90.	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			2.250.000,00	
2.02.91.		Dukungan Pencegahan/Penanganan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif lainnya) dan Penyakit Men			3.000.000,00	DDS, PBH
2.02.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.000.000,00	
2.02.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.000.000,00	
2.02.91.	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.000.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			24.000.000,00	
2.03.07.		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa			21.600.000,00	DDS, PBH
2.03.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			21.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			21.600.000,00	
2.03.07.	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			7.600.000,00	
2.03.07.	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			14.000.000,00	
2.03.17.		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **			2.400.000,00	DDS
2.03.17.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.400.000,00	
2.03.17.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			600.000,00	
2.03.17.	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			600.000,00	
2.03.17.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.800.000,00	
2.03.17.	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			1.800.000,00	
02.05.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			14.000.000,00	
2.05.02.		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa			14.000.000,00	DDS, PBH
2.05.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			14.000.000,00	
2.05.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			14.000.000,00	
2.05.02.	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			14.000.000,00	
02.06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			77.167.000,00	
2.06.02.		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)			76.967.000,00	DDS, PAD, PBH
2.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			76.967.000,00	
2.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			53.325.000,00	
2.06.02.	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			44.900.000,00	
2.06.02.	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			8.425.000,00	
2.06.02.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			23.642.000,00	
2.06.02.	5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar			6.120.000,00	
2.06.02.	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet			17.522.000,00	
2.06.03.		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa			200.000,00	DDS
2.06.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			200.000,00	
2.06.03.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.06.03.	5.2.5.92.	Belanja Jasa Domain Desa			200.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			51.203.664,00	
03.01.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			37.500.000,00	
3.01.02.		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes			36.500.000,00	PBH
3.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			36.500.000,00	
3.01.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			36.500.000,00	
3.01.02.	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			36.500.000,00	
3.01.06.		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin			1.000.000,00	PBH
3.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.000.000,00	
3.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.000.000,00	
3.01.06.	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.000.000,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			7.500.000,00	
3.02.03.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)			7.500.000,00	PBH
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.500.000,00	
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.500.000,00	
3.02.03.	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			7.500.000,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			4.000.000,00	
3.03.01.		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota			4.000.000,00	PBH
3.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.000.000,00	
3.03.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.000.000,00	
3.03.01.	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.000.000,00	
3.03.01.	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			4.000.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			2.203.664,00	
3.04.03.		Pembinaan PKK			2.203.664,00	PBH
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.203.664,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.203.664,00	
3.04.03.	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.203.664,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			440.133.611,52	
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			73.752.760,00	
4.02.01.		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)			73.752.760,00	DDS, PBH
4.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			73.752.760,00	
4.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			43.395.760,00	
4.02.01.	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			24.319.000,00	
4.02.01.	5.2.1.12.	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian			19.076.760,00	
4.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			20.250.000,00	
4.02.01.	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			8.000.000,00	
4.02.01.	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Pelugas			12.250.000,00	
4.02.01.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			10.107.000,00	
4.02.01.	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan			10.107.000,00	
04.03.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			251.160.000,00	
4.03.01.		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa			7.200.000,00	PBH
4.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.200.000,00	
4.03.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			7.200.000,00	
4.03.01.	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			3.200.000,00	
4.03.01.	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			4.000.000,00	
4.03.02.		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa			183.960.000,00	ADD, PAD, PBH
4.03.02.	5.1.	Belanja Pegawai			164.960.000,00	
4.03.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			164.960.000,00	
4.03.02.	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa			49.920.000,00	
4.03.02.	5.1.2.90.	Tunjangan Keluarga			24.960.000,00	
4.03.02.	5.1.2.91	Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa			44.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.03.02.	5.1.2.92	Tunjangan Penambah Kebutuhan Perangkat Desa			10.400.000,00	
4.03.02.	5.1.2.94.	Uang Makan			35.280.000,00	
4.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			19.000.000,00	
4.03.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			19.000.000,00	
4.03.02.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			8.000.000,00	
4.03.02.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			11.000.000,00	
4.03.03.		Peningkatan Kapasitas BPD			60.000.000,00	ADD, PBH
4.03.03.	5.1.	Belanja Pegawai			51.000.000,00	
4.03.03.	5.1.4.	Tunjangan BPD			51.000.000,00	
4.03.03.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			51.000.000,00	
4.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.000.000,00	
4.03.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			9.000.000,00	
4.03.03.	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			3.500.000,00	
4.03.03.	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			5.500.000,00	
04.04.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			86.220.851,52	
4.04.01.		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan			86.220.851,52	DDS, PBH
4.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			86.220.851,52	
4.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			21.270.851,52	
4.04.01.	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.600.000,00	
4.04.01.	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.070.851,52	
4.04.01.	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			18.600.000,00	
4.04.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			64.950.000,00	
4.04.01.	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			11.550.000,00	
4.04.01.	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			1.100.000,00	
4.04.01.	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan			14.400.000,00	
4.04.01.	5.2.3.90.	Belanja Bantuan Transport			37.900.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
04.05.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)			29.000.000,00	
4.05.02.		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi			29.000.000,00	DDS
4.05.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			29.000.000,00	
4.05.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			29.000.000,00	
4.05.02.	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.000.000,00	
4.05.02.	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material			24.000.000,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			33.600.000,00	
05.01.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana			1.500.000,00	
5.01.00.		Kegiatan Penanggulangan Bencana			1.500.000,00	DDS
5.01.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			1.500.000,00	
5.01.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			1.500.000,00	
5.01.00.	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga			1.500.000,00	
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			32.100.000,00	
5.03.00.		Penanganan Keadaan Mendesak			32.100.000,00	DDS, PBH
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			32.100.000,00	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			32.100.000,00	
5.03.00.	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga			32.100.000,00	
		JUMLAH BELANJA			1.334.642.431,03	
		SURPLUS DEFISIT			78.944.883,97	
6.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan			11.458.911,23	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya			11.458.911,23	
6.1.1.01.		SILPA Tahun Sebelumnya			11.458.911,23	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan			90.403.795,20	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa			90.403.795,20	
6.2.2.01.		Penyertaan Modal Desa			90.403.795,20	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
		PEMBIAYAAN NETTO			78.944.883,97	
SISA LEEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN					0,00	

